



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan penyusunan Renja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan Renja di tahun mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berperan aktif dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Yogyakarta,

2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta



Drs. AGUS WINARTO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota.

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2022 serta mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022. Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kota Yogyakarta yakni misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta "Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta" dengan tujuan "Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat." Sasaran yang ditentukan yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat dengan indikator kinerja sasaran "Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat." Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh OPD terkait diantaranya yang mengampu bidang pemuda dan olahraga serta bidang kesatuan bangsa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Yogyakarta, serta memuat arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, Strategi Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Kebijakan Umum dan Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi pergeseran pagu kegiatan OPD, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat, dan
5. Keadaan luar biasa.

Maka berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yakni:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka

untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022, menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022.

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2022

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II :

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022 sampai dengan Triwulan II

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pada tahun 2022, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan (laporan dinamis). Selain itu juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil renja setiap tribulan oleh Bappeda Kota Yogyakarta melalui SIM Monitoring dan Evaluasi (SIMONEVA)

Pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan setiap tribulan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja sampai dengan Tribulan II atau Semester I Tahun 2022 Satpol PP untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada indikator program Internal ini belum dapat disajikan data capaian program karena baru dapat terlihat dari Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian dari hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun anggaran 2021 didapatkan nilai SAKIP Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 86,67 dengan predikat A (memuaskan). Dilihat dari perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II dapat diketahui capaian kegiatan pada program internal, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sampai dengan TW II realisasi fisik kegiatan adalah 100% telah sesuai dengan target. Untuk realisasi keuangan tidak/belum dilaksanakan karena kegiatan telah berjalan efektif tanpa harus menggunakan anggaran yang ada.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tidak optimalnya realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan ini karena Efisiensi penggunaan BBM kendaraan dinas operasional menyesuaikan dengan penggunaan ril di lapangan. Di samping itu juga untuk biaya pemeliharaan peralatan kantor, terdapat beberapa peralatan dan mesin masih dalam kondisi baik sehingga tidak semua peralatan yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan.

Untuk keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan TW II ini telah terealisasi Rp8.004.380.676,32 dari target Rp14.733.034.532,00 (tingkat realisasi 54,32%). Terhadap target satu tahun mendapat capaian realisasi keuangan sebesar 44,16%.

2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada program utama Satpol PP Kota Yogyakarta ini diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

- a. Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3). Capaian kinerja program ini dengan diukur dengan indikator persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) dan dengan menggunakan rumus : $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$
Sampai dengan Triwulan II 2022 telah terjaring 3275 pelanggaran perda dan perkara dan terselesaikan 3275 pelanggaran. Jumlah 3275 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terjaring dan terselesaikan secara non yustisi sebesar 3185 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 90 pelanggaran. Dari data tersebut didapat realisasi fisik program sebesar 100% terhadap target TW II 2022 yaitu 97,5%, sehingga tingkat realisasinya mencapai 102,56%.
Adapun faktor pendorong capaian kinerja pada program ini yakni terdapat optimalisasi kinerja pejabat fungsional Satpol PP dan SDM pendukung kegiatan penegakan perda telah mencukupi. Untuk faktor penghambat kinerja diantaranya sarpras pendukung kegiatan penegakan perda yang

masih belum dapat terakomodir dan juga banyaknya peraturan daerah yang perlu ditegakkan menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan penegakannya

- b. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan rumus : Jumlah potensi gangguan tibumtranmas yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan tibumtranmas di Kota Yogyakarta. Sampai dengan TW II 2022 ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 97% dengan realisasi 100% dengan tingkat realisasi sebesar 103,09%. Faktor pendorong keberhasilan kinerja pada program ini adalah terdapat sinergitas petugas di lapangan dengan stakeholder dan instansi vertikal (TNI, Poln) dalam mencegah dan menanggulangi potensi konflik. Beberapa kendala yang dihadapi seringkali karena faktor eksternal yakni keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi konflik yang lebih besar (kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat)
- c. Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP

Capaian realisasi pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- Rumusan pengukuran realisasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan. Realisasi untuk indikator ini adalah 97,65% atau capaian komposit kinerja pada indikator ini adalah 48,82% sesuai dengan target sampai dengan TW II.

$$\text{Rumus : } \frac{\sum \text{hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum}}{\sum \text{peraturan perundang-undangan.}} \times 100\%$$

$$(\%) \text{ pengkajian : } \frac{83}{85} \times 100\% = 97,65 \%$$

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaaan dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaaan. Sampai dengan TW II, kegiatan ini belum terlaksana karena tatakal kegiatan dilaksanakan di Tribunal III dan IV. Dalam rangka mengukur capaian kinerja program menggunakan indikator Persentase peningkatan kapasitas Pol PP dengan formulasi penghitungan : (50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan

perlu dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas (jumlah komposit dari 25% dikali persentase realisasi anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi anggota yang lulus samapta. Untuk kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan didapatkan realisasi peserta pemahaman peraturan lulus seluruhnya dengan capaian sebesar 100%. Sampai TW II 2022 ini telah terealisasi 73,82% dari target TW II sebesar 68,82% atau capaian kinerja 107,27%.

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja pada program ini antara lain terdapat antusiasme pegawai dalam kegiatan pengembangan kapasitas SDM dan SDM pengkaji peraturan perundang-undangan yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM terkadang terhambat jadwal pelaksanaan kegiatan reguler pegawai

- d. Indikator Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dengan rumus Penjumlahan realisasi komposit dari :
1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dengan bobot komposit 50%;
 2. Pembentukan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Pembentukan Sekolah Panca Tertib bobot 5%
 3. Penumbuhan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Penumbuhan Sekolah Panca Tertib bobot 5%.

- Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 RT terdapat minimal 1 orang petugas linmas. Hal tersebut juga merupakan penerapan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh kemendagri. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 3823 personil dengan jumlah RT di Kota Yogyakarta sejumlah 2534 RT sehingga dari jumlah 170 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki petugas linmas telah terpenuhi 100 %. Bobot nilai komposit dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 50 %.

- Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan TW II tahun 2022 telah terbentuk 119 Kampung Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 70% yang merupakan hasil dari 119 kampung dibagi 170 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit

kegiatan adalah 20% dikali 70% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 14%.

- Realisasi Pembentukan Pantib for school sampai dengan TW II tahun 2022 telah terbentuk 9 sekolah. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Pantib for school yang terbentuk adalah 90% yang merupakan hasil dari 9 sekolah panca tertib dibagi target 10 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Pantib for school adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 90% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 4,5%.
- Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib sampai dengan TW II tahun 2022 telah ditumbuhkan 119 Kampung Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang ditumbuhkan adalah 70% yang merupakan hasil dari 119 kampung dibagi 170 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 70% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 14%.
- Realisasi Penumbuhan Pantib for school sampai dengan TW II tahun 2022 telah ditumbuhkan 9 sekolah. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Pantib for school yang ditumbuhkan adalah 90% yang merupakan hasil dari 9 sekolah panca tertib dibagi target 10 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Pantib for school adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 90% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 4,5%.

Sampai dengan TW II 2022 telah terealisasi 87% dari target 93,88% (tingkat realisasi 103,71%). Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pada program ini adalah tingginya animo masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat (peran serta aktif kegiatan Gerakan Panca Tertib dan keikutsertaan menjadi anggota linmas). Kendala yang terkadang ditemui yakni koordinasi lintas OPD belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Panca Tertib dan juga jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat menyesuaikan agenda dari kampung bersangkutan.

Capaian kinerja sasaran Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Meningkat pada Satpol PP semester I Tahun 2022 sebesar 103,68% diperoleh dari realisasi 92,16% terhadap target 88,89%.

Realisasi sebesar 92,16% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah $20\% \times 73,82\% = 14,76\%$
- Komposit realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah $20\% \times 87\% = 17,40\%$

Untuk keuangan pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sampai dengan TW II ini telah terealisasi Rp6.804.645.602,08 dari target Rp7.410.105.772,00 (tingkat realisasi 91,82%). Terhadap target satu tahun mendapat capaian realisasi keuangan sebesar 39,92%.

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2022 secara naratif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar Rp35.170.815.589,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sejumlah Rp16.928.276.000,00, Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp18.242.539.589,00. Realisasi anggaran Satpol PP Kota Yogyakarta s.d TW II 2022 sebesar Rp14.809.026.278,40 atau sebesar 66,87% dari target s.d TW II (termasuk belanja pegawai) atau 42,11% dari total anggaran satu tahun.

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah koordinasi internal setiap minggu, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi. Faktor penghambat pelaksanaan kinerja sasaran diantaranya pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan pihak ketiga, kegiatan Insidentil, serta dinamisasi keadaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan; Kebijakan terkait penatausahaan keuangan yang mempengaruhi serapan anggaran tidak optimal (misal terdapat penyempurnaan/revisi perwal penjabaran APBD).

Dalam rangka meminimalisasi kendala/ hambatan, maka perlu dan telah diambil langkah tindakan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kegiatan secara optimal dengan ketersediaan sarpras pendukung yang ada, sehingga tidak terjadi deviasi baik keuangan maupun fisik pada triwulan berikutnya
- 2) Koordinasi lebih intensif dengan pihak penyedia dan stakeholder lain untuk menunjang optimalisasi realisasi fisik kegiatan dan keuangan
- 3) Penyesuaian ulang tatakala kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan
- 4) Penataan kembali tatakala kegiatan yang menjadi prioritas. Kegiatan yang belum terlaksana segera dilaksanakan sesuai tatakala untuk memaksimalkan realisasi fisik dan penyerapan anggaran
- 5) Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/ program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya
- 6) Optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- 7) Perlu perencanaan yang lebih matang dan komprehensif dalam penentuan target fisik, tatakala kegiatan, dan perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman pada kegiatan prioritas sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal
- 8) Strategi proses penyampaian SPJ kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pihak ketiga perlu dievaluasi kembali
- 9) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
- 10) Penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya dengan melihat trend maupun kecenderungan pada tahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada triwulan awal tidak mengalami deviasi yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan penyusunan kontrak lebih awal dengan penyedia jasa pihak ketiga

Evaluasi terhadap hasil renja Satpol PF Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1.

		6. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keanggotan SKPD			0,00	0,00	90.000,00	50,00%	45.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Bahan Pelakonan/Verifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen			50,00%		50,00%		100,00%							
		7. Kelembagaan dan Pemeliharaan Akutansi SKPD			0,00	0,00	90.000,00	50,00%	45.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen			50,00%		50,00%		100,00%							
		8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
		9. Pengelohan dan Pengujian Bahan Tinggapan Pemeliharaan			0,00	0,00	417.000,00	32,83%	137.000,00	32,83%	0,00	100,00%	0,00%						
		Bahan Tinggapan Pemeliharaan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen			32,83%		32,83%		100,00%							
		10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/ Semester SKPD			0,00	0,00	417.000,00	27,19%	280.000,00	27,19%	0,00	100,00%	0,00%						
		Laporan Keuangan Bulanan/Semester	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen			27,19%		27,19%		100,00%							
		11. Pelaksanaan Pekerjaan dan Analisis Penguasaan Realisasi Anggaran			0,00	0,00	80.000,00	50,00%	40.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Laporan Penguasaan Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen			50,00%		50,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		12. Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Perangkoan Bangunan Kantor			0,00	0,00	4.125.000,00	40,26%	1.685.000,00	40,26%	2.440.000,00	100,00%	100,00%						
		Konsumsi Instalasi Listrik/Perangkoan Bangunan Kantor	0 jenis	0 jenis	0 jenis			40,26%		40,26%		100,00%							
		13. Penyediaan Prorata dan Perengkapan Kantor			0,00	0,00	73.078.852,00	28,07%	45.271.025,00	62,11%	27.807.827,00	100,00%	100,00%						
		Alat Tulis Kantor	0 jenis	0 jenis	50 jenis			28,07%		28,07%		100,00%							
		Baterai laptop	0 buah	0 buah	3 buah			28,07%		28,07%		100,00%							
		Charger laptop	0 buah	0 buah	2 buah			28,07%		28,07%		100,00%							
		Cord Pjbl	0 buah	0 buah	5 buah			28,07%		28,07%		100,00%							
		Flashdisk	0 buah	0 buah	20 buah			28,07%		28,07%		100,00%							
		Kardus USB	0 buah	0 buah	5 buah			28,07%		28,07%		100,00%							
		Keyboard	0 buah	0 buah	4 buah			28,07%		28,07%		100,00%							
		Mouse	0 buah	0 buah	12 buah			28,07%		28,07%		100,00%							
		Peralatan Kantor Lainnya	0 jenis	0 jenis	20 jenis			28,07%		28,07%		100,00%							
		Roller Print	0 jenis	0 jenis	3 jenis			28,07%		28,07%		100,00%							
		Tempor printer	0 jenis	0 jenis	4 jenis			28,07%		28,07%		100,00%							
		UVB Terminal	0 buah	0 buah	5 buah			28,07%		28,07%		100,00%							
		14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	0,00	45.215.000,00	42,96%	35.025.500,00	77,46%	10.189.500,00	77,26%	74,31%						
		Barang cetakan	0 jenis	0 jenis	13 jenis			42,96%		76,03%		76,41%							
		Penggandaan surat dan dokumen	0 lembar	0 lembar	300.000 lembar			42,96%		37,04%		86,13%							
		15. Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Peralatan/aksesoris			0,00	0,00	2.640.000,00	40,00%	1.120.000,00	46,00%	1.520.000,00	62,90%	122,70%						
		Syar Kabel/aksesoris	0 jenis	0 jenis	2 jenis			40,00%		46,00%		92,00%							
		16. Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SKPD			0,00	0,00	23.300.000,00	70,96%	28.000.000,00	70,96%	4.700.000,00	100,00%	82,47%						
		Materi, Materi Rapor	0 OS	0 OS	1.000 OS			70,96%		84,01%		80,00%							
		Rapor Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah (RUKAD)	0 Kali	0 Kali	4 Kali			70,96%		85,10%		100,00%							
		Rapor Koordinasi dan Komunikasi Luar Daerah (RUKLUAD)	0 Kali	0 Kali	1 Kali			70,96%		86,51%		120,70%							
		Rapor Koordinasi	0 Kali	0 Kali	1 Kali			70,96%		84,01%		80,00%							

Rincian Anggaran Biaya

Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah

17. Penyediaan Jasa Sema Alapara

				0,00	0,00	2.000.000,00	45,45%	2.700.000,00	60,00%	5.100.000,00	45,20%	111,82%
Muatan		0 lembar	0 lembar	300 lembar			40,83%	30,00%		100,00%		
Pengantar (termal gratis)		0 buku	0 buku	10 buku			40,83%	25,00%		54,59%		
Surat Keluar		5 surat	0 surat	10 surat			45,45%	44,00%		90,90%		

18. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Data dan Jarak

				0,00	0,00	5.000.000,00	40,00%	2.700.000,00	67,50%	7.700.000,00	60,00%	100,00%
Pembayaran rekening telepon		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan			40,00%	45,00%		90,00%		

19. Penyediaan Jasa Pembersihan Ruang Kerja

				0,00	0,00	700.000.000,00	40,00%	57.000.000,00	40,00%	800.000.000,00	100,00%	100,00%
Jasa Cleaning Service		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan			40,00%	40,00%		100,00%		

Pembayaran Pajak Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah

20. Penyediaan Jasa Pembinaan/Biaya Pembinaan dan Pajak Kendaran Hewan dan Perikanan dan Kehutanan Dinas Lainnya

				0,00	0,00	84.500.000,00	50,71%	42.400.000,00	50,19%	126.900.000,00	52,19%	61,29%
Pembayaran Pajak kendaraan perorangan (dinas/kendaraan dinas jabatan kode 2)		0 unit	0 unit	17 unit			50,71%	46,00%		90,71%		
Pembayaran Pajak kendaraan perorangan (dinas/kendaraan dinas jabatan kode 4)		0 unit	0 unit	1 unit			50,71%	66,00%		100,00%		
Pembayaran pajak kendaraan perorangan (dinas/kendaraan dinas jabatan kode 2)		0 unit	0 unit	17 unit			50,71%	46,00%		90,71%		
Pembayaran pajak kendaraan perorangan (dinas/kendaraan dinas jabatan kode 4)		0 unit	0 unit	1 unit			50,71%	66,00%		100,00%		

21. Penyediaan Jasa Pembinaan/Biaya Pembinaan/Pajak dan Perbaikan Kendaran Dinas Operasional dan Lapangan

				0,00	0,00	299.250.000,00	52,00%	315.210.000,00	48,39%	614.460.000,00	62,00%	100,00%
Pembayaran Pajak dan STNK kendaraan dinas operasional lapangan kode 4		0 unit	0 unit	20 unit			52,00%	49,00%		91,20%		
Pembayaran Pajak dan STNK kendaraan dinas operasional lapangan kode 6		0 unit	0 unit	5 unit			52,00%	66,00%		91,20%		
Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional lapangan kode 2		0 unit	0 unit	27 unit			52,00%	54,00%		101,00%		
Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional lapangan kode 2		0 unit	0 unit	27 unit			52,00%	48,00%		91,20%		
Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional lapangan kode 4		0 unit	0 unit	20 unit			52,00%	48,00%		91,20%		
Pembayaran		0 unit	0 unit	5 unit			52,00%	52,00%		100,00%		

		22. Pembinaan Petani/Jan. Masa Lainnya	0 unit	0 unit	5 unit	0,00%	17.400.000,00	52,10%	8.075.000,00	21,54%	2.160.000,00	22,17%	26,81%						
		AC Sph	0 unit	0 unit	5 unit	0,00%		52,10%		52,10%		100,00%							
		HT	0 unit	0 unit	3 unit	0,00%		82,10%		82,10%		100,00%							
		Kamar	0 unit	0 unit	2 unit	0,00%		52,10%		52,10%		100,00%							
		Komputer	0 unit	0 unit	1 unit	0,00%		52,10%		52,10%		100,00%							
		Laptop	0 unit	0 unit	2 unit	0,00%		52,10%		52,10%		100,00%							
		Mesa Kerja	0 unit	0 unit	3 unit	0,00%		52,10%		52,10%		100,00%							
		Perahu Kalimantan	0 unit	0 unit	1 unit	0,00%		52,10%		52,10%		100,00%							
		Pemakaian	0 unit	0 unit	3 unit	0,00%		52,10%		52,10%		100,00%							
		Promosi	0 unit	0 unit	10 unit	0,00%		52,10%		52,10%		100,00%							
		23. Pembinaan/Tablisan Gadang Kumbu dan Harapan Lainnya	0 unit	0 unit	7 unit	0,00%	16.000.000,00	48,00%	8.000.000,00	24,00%	2.000.000,00	25,00%	31,00%						
		Beranda Bangunan Kumbu	0 unit	0 unit	7 unit	0,00%		48,00%		48,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kerja												81,22%	55,03%						
Peringkat Mayor												Yang	Berdik						

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044.773.804,00	49,09%	7.490.218.617,00	43,95%	2.208.677.863,00	28,06%	100,34%				
Program Peningkatan Keterterimaan dan Keterlibatan Umum																		
Pengembangan Kegiatan Keletteran dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		1. Penguatan Kegiatan Keletteran dan Keterlibatan Umum melalui Desa/Desa dan Uptan dan/atau dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan	0 unit	0 unit	5 unit	0,00%	3.217.042.596,00	46,34%	2.255.597.279,00	69,54%	2.139.239.931,29	100,00%	100,10%					
		Kegiatan Publik yang dilakukan pengumuman	0 Pengumuman	0 Pengumuman	2 Pengumuman	0,00%		40,00%		40,00%		100,00%						
		Kegiatan Publik yang dilakukan pengumuman	0 Pengumuman	0 Pengumuman	2 Pengumuman	0,00%		40,00%		40,00%		100,00%						
		Tempat yang dilakukan Pengumuman (Kecamatan, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Desa, Kecamatan)	0 Objek	3 Objek	0,00%	0,00%	100,00%											
		Tempat yang dilakukan Pengumuman (Kecamatan, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Desa, Kecamatan)	0 Objek	3 Objek	0,00%	0,00%	100,00%											
		2. Pembinaan atau Kegiatan Keletteran dan Keterlibatan Umum Berbasis Desa/Desa dan/atau Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan	0 unit	0 unit	14 unit	0,00%	146.536.275,00	42,58%	66.106.549,00	44,92%	70.066.170,00	98,90%	100,00%					
		Monev/inspeksi dan/atau Pengawasan	0 Laporan Operasi	14 Laporan Operasi	40,49%	43,00%	98,90%											
		Monev/inspeksi dan/atau Pengawasan	0 Laporan Operasi	14 Laporan Operasi	40,49%	45,00%	99,07%											
		3. Koordinasi Penyelenggaraan Keletteran dan Keterlibatan Umum dan/atau Penyelenggaraan	0 unit	0 unit	3 unit	0,00%	31.610.000,00	27,57%	15.171.000,00	27,11%	17.075.000,00	122,17%	100,00%					
		Himpunan/Forum	0 unit	0 unit	3 unit	0,00%		27,57%		100,00%		172,17%						

		Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pemas' Tidak Internal													
			Dimengenal sebagai Pemas' Tidak Internal													
				0 Kali	0 Kali	1 Kali	37,37%		100,00%		174,31%					
			Kelemah persiapan Persewaan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	25,27%		25,27%		100,00%					
			Kepatu persiapan Persewaan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	17,77%		17,77%		100,00%					
Pembinaan SDM		Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	72,7%		25,00%		43,59%						
Pembinaan SDM		Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	72,7%		25,00%		43,59%						
Kelemah dan keefektifan prosedur layanan daerah		Peraturan PerUUan		0 Peraturan PerUUan	1 Peraturan PerUUan	50,00%		100,00%		154,55%						
Kelemah dan keefektifan prosedur layanan daerah		Peraturan PerUUan		0 Peraturan PerUUan	4 Peraturan PerUUan	72,7%		100,00%		174,31%						
			6. Pemeliharaan Perencanaan Masyarakat dalam rangka Keberlanjutan dan Keterlibatan Timan				0,00	0,00		(1.318.267.386,00)	31,29%	452.269.788,00	31,29%	365.551.081,96	100,00%	111,23%
			Mobilisasi pemas' Dinas	0 Kali	0 Kali	24 Kali	76,92%		76,92%		100,00%					
			Mobilisasi layanan Dinas	0 kali	0 Kali	54 Kali	54,00%		54,00%		100,00%					
			Mobilisasi Pemas' Dinas dalam persiapan mobilisasi dan bencana (20 orang)	0 Bulan	0 Bulan	4 Bulan	67,00%		67,00%		100,00%					
			Mobilisasi Pemas' Dinas dalam persiapan mobilisasi dan bencana (20 orang)	0 Bulan	0 Bulan	4 Bulan	67,00%		67,00%		100,00%					
Pembinaan Kerja Timah Anggota Timan		0 buah		0 buah	54 buah	50,00%		50,00%		100,00%						
Pembinaan Kerja Timah Anggota Timan		0 buah		0 buah	54 buah	50,00%		50,00%		100,00%						
Pikat Nalirunya Kerja Yogyakarta (20 orang) (20)		0 buah		0 buah	204 buah	51,00%		51,00%		100,00%						
Pikat Nalirunya Kerja Yogyakarta (20 orang) (20)		0 buah		0 buah	204 buah	51,00%		51,00%		100,00%						
			7. Peningkatan Kapasitas SDG dalam Perencanaan dan Sustain Perencanaan Masyarakat (termasuk dalam Pelaksanaan Tugas SUDG Berencana Hak Asasi Manusia)				0,00	0,00		240.821.122,00	41,28%	99.196.296,20	22,90%	22.878.348,22	55,40%	22,17%
			Tringas Komit	0 Kali	0 Kali	11 Kali	41,28%		41,28%		75,00%					
			Tringas Komit	0 Kali	0 Kali	13 Kali	41,50%		41,50%		75,00%					
			Kemampuan Pok PP dan Timan (00 orang per pp dan 50 orang Timan)	0 Kali	0 Kali	12 Kali	41,25%		41,25%		100,00%					
			Kemampuan Pok PP dan Timan (00 orang per pp dan 50 orang Timan)	0 Kali	0 Kali	11 Kali	41,25%		41,25%		100,00%					
			Pembekalan Timan	0 Kali	0 Kali	2 Kali	41,25%		41,25%		100,00%					
			Pembekalan Timan	0 Kali	0 Kali	2 Kali	41,25%		41,25%		100,00%					
Peraturan penindas-anbangan yang		Peraturan PerUUan		0 Peraturan PerUUan	8 Peraturan PerUUan	72,7%		100,00%		74,30%						
Peraturan penindas-anbangan yang		Peraturan		0 Peraturan PerUUan	8 Peraturan PerUUan	41,2%		100,00%		34,30%						

Kepercayaan di media massa	0 Kab																		
Tes Kemampuan (00 orang)	0 Kab		0 Kab	2 Kab	41,25%	2,07%		8,62%											
Tes Kemampuan (50 orang)	0 Kab		0 Kab	2 Kab	41,25%	3,92%		8,62%											
Workshop Jalinan Fungsional (Kapas/Pada) Pangan (100 orang)	0 Kab		0 Kab	1 Kab	41,25%	3,92%		8,62%											
Workshop Jalinan Fungsional (Kapas/Pada) Pangan (100 orang)	0 Kab		0 Kab	1 Kab	41,25%	3,92%		8,62%											
Evaluasi Kesiapan Layanan dan Kemampuan dalam Tercakup Penggunaan dan Pemrograman Gangguan Kolektif dan Kontribusi Lintas					0,00	0,00	1.213.663.890,00	41,25%	326.757.448,00	41,25%	637.895.340,00	100,00%	130,53%						
			Evaluasi Informatika / Gerdik Pansa Terbit	0 Laporan	0 Laporan	0,00%		0,00%		100,00%									
			Evaluasi Informatika / Gerdik Pansa Terbit	0 Laporan	0 Laporan	0,00%		0,00%		100,00%									
			Pencanangan Gerdik Kampung Pansa Terbit	0 Kampung	0 Kampung	0,00%		0,00%		100,00%									
			Pencanangan Gerdik Kampung Pansa Terbit	0 Kampung	0 Kampung	0,00%		0,00%		100,00%									
Pencanangan Gerdik Panti Sa School	0 Sekolah		0 Sekolah	4 Sekolah	31,00%	31,00%		100,00%											
Penyuluhan Panti Sa School	0 Sekolah		0 Sekolah	6 Sekolah	51,00%	31,00%		100,00%											
Penyuluhan Panti Sa School	0 Sekolah		0 Sekolah	6 Sekolah	51,00%	31,00%		100,00%											
Penyusunan Naskah Kerjasama	0 Dokumen		0 Dokumen	9 Dokumen	51,00%	31,00%		100,00%											
Penyusunan Naskah Kerjasama	0 Dokumen		0 Dokumen	9 Dokumen	51,00%	31,00%		100,00%											
Pengadaan dan Penyaluran Bantuan dan Prasarana Kemudahan dan Keterlambatan Lintas					0,00	0,00	40.300.000,00	100,00%	40.300.000,00	100,00%	40.300.000,00	100,00%	100,00%						
			Pengadaan Pakar / Dinas Lapangan / Lima Lima sebagai kegiatan	0 unit	0 unit	0,00%		0,00%		100,00%									
Pengadaan Pakar /Dinas Lapangan Lima Lima sebagai kegiatan	0 unit		0 unit	0 unit	100,00%	100,00%		100,00%											
Pengadaan Layanan dalam rangka Dampak Pengadaan Perumahan dan Perkotaan					0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Komponen Informatika yang mendukung proses pengelolaan Perda Kota Yogyakarta (IPM)	0 Tahun	0 Tahun	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
Komponen Informatika yang mendukung proses pengelolaan Perda Kota Yogyakarta (IPM)	0 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	0,00%	0,00%		0,00%											
Pengadaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Regional Kota																			
Pengadaan atau Kepastian sebagai Penerimaan Perumahan Daerah dan Perumahan Regional/Kota					0,00	0,00	8.455.973.464,00	42,72%	3.016.371.447,00	42,72%	3.962.938.200,00	100,00%	100,00%						
			Operasi Non Yastek Pengelolaan Perda	0 laporan	0 laporan			42,72%		42,72%		100,00%							
			Operasi Non Yastek Pengelolaan Perda	0 laporan	0 laporan			42,72%		42,72%		100,00%							

			Operasional Pada Pemasangan Produk Partisipasi	0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
			Operasional Pada Pemasangan Produk Partisipasi	0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
			Peningkatan pelayanan pada dan peribadi	0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
			Peningkatan pelayanan pada dan peribadi	0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
Pengabdian Komunitas Khusus		0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%														
Pengabdian Komunitas Umum		0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%														
Pengabdian Komunitas Terpadu		0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%														
Pengabdian Komunitas Wanita		0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%														
Pengabdian Komunitas Lansia		0 laporan	0 laporan	12 laporan	42,72%	42,72%	100,00%														
		10	Peningkatan dan Pelayanan Pemantau Daerah dan Perumahan Dusun/Wali Kota		0,00	0,00	305.300.000,00	44,90%	131.162.424,00	43,04%	131.037.777,60	100,00%	105,34%								
			Laporan pelayanan pada yang ditindak sesuai syarat	0 laporan	0 laporan	12 laporan	44,90%	44,90%	100,00%												
			Laporan pelayanan pada yang ditindak sesuai syarat	0 laporan	0 laporan	12 laporan	44,90%	44,90%	100,00%												
Pengabdian bukan terdapat anggaran yang tidak memenuhi peraturan PPNS		0 laporan	0 laporan	12 laporan	44,90%	44,90%	100,00%														
Pengabdian bukan terdapat anggaran yang tidak memenuhi anggaran PPNS		0 laporan	0 laporan	12 laporan	44,90%	44,90%	100,00%														
Pembinaan Pemilih Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota:																					
		11	Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan PPNS		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Coaching elite PPNS (30 orang)	0 Kab	0 Kab	3 Kab	0,00%	0,00%	0,00%												
Coaching elite PPNS (30 orang)		0 Kab	0 Kab	3 Kab	0,00%	0,00%	0,00%														
Pengakuan Perintasan Daerah Kabupaten Kota dan Perintasan Dusun/Wali Kota																					
		12	Swakelola Pengabdian Perintasan Daerah dan Perintasan Dusun/Wali Kota		0,00	0,00	2.420.000,00	100,00%	2.420.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%								
			Tetapannya Swakelola Pengabdian Perintasan Daerah dan Perintasan Dusun/Wali Kota	0 laporan	0 laporan	1 laporan	100,00%	100,00%	100,00%												
Tetapannya Swakelola Pengabdian Perintasan Daerah dan Perintasan Dusun/Wali Kota		0 laporan	0 laporan	1 laporan	100,00%	100,00%	100,00%														
										Rata-rata capaian kinerja		88,97%		88,31%							
										Profilkat Kinerja		Tinggi		Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program							10.242.279.585,00	8.028.723.199,00	8.026.785.707,40												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)												81,13%		100,61%							

Profilak kinerja dan seluruh program (program 1 s.d, program 2)							Dapat	Sangat Tinggi					
Tingkat Peningkatan Kesehatan Kerja	Kondisi internal setiap minggu, monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan serta seluruh kegiatan setiap hari/pekerjaan sesuai program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana CPD dapat segera diatasi, tingkat tidak terjadi gangguan internal dan akses data.												
Adaptasi Pengawasan Kesehatan Kerja	Pelaksanaan kegiatan termasuk koordinasi melalui forum koordinasi yang melibatkan pemantauan administratif dengan pihak ketiga, kegiatan internal, serta dukungan kegiatan yang menggunakan pengujian kebijakan, kebijakan terkait (manajemen keuangan yang menggunakan sumber anggaran tidak optimal untuk kegiatan penyempurnaan/revolusi prosedur pekerjaan SPPD).												
Tingkat target yang direalisasikan dalam siklus/bulanan	Melaksanakan kegiatan secara optimal dengan koordinasi seluruh pendukung yang ada, sehingga tidak terjadi deviasi baik anggaran maupun fisik pada timeline berikutnya. Kombinasi lebih awal dengan pihak penyedia dan subkontraktor lain untuk menampung optimalisasi rekayasa fisik kegiatan dan keuangan. Pelaksanaan yang mencakup kegiatan dan pencapaian pelaksanaan kegiatan.												
Tingkat target yang direalisasikan dalam siklus/bulanan	Pelaksanaan perencanaan pada tahun berikutnya dengan melibatkan pihak lain/kelembagaan pada tahun sebelumnya, sehingga pengalihan pada timeline awal tidak mengalami deviasi yang cukup signifikan, koordinasi terkait dengan penyusunan kontrak lebih awal dengan penyedia jasa pihak ketiga.												

Yogyakarta,

Ditandatangani
Kepala S-STP/PP

Dr. ARIYAN WIGAYO
NIP. 197302101990219604

2022

Yogyakarta,

Ditandatangani oleh
Kepala BAPPEDS

Agus Tri Harjono, ST, MT
NIP. 1970030119661004

2022

		7. Kegiatan dan Pelaksanaan Anggaran APBD	Verifikasi			0,00	0,00	86.000,00	0,00%	43.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00%		
			Aturan dan Peraturan Kabupaten	0 Dokumen	0 Dokumen			3 Dokumen	0,00%		30,00%		100,00%			
		8. Kegiatan dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akut Tahun APBD				0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		
			Laporan Keuangan Akut Tahun	0 Dokumen	0 Dokumen			1 Dokumen	0,00%		0,00%		0,00%			
		9. Pengadaan dan Pengapian Dalam Anggaran Pemerintah				0,00	0,00	417.000,00	32,85%	117.000,00	28,06%	0,00	0,00%	0,00%		
			Dokumen Pengadaan Permintaan	0 Dokumen	0 Dokumen			2 Dokumen	32,85%		32,00%		100,00%			
		10. Kegiatan dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Dalam Anggaran Pemerintah APBD				0,00	0,00	417.000,00	67,15%	200.000,00	47,99%	0,00	0,00%	0,00%		
			Laporan Keuangan Dalam Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen			12 Dokumen	67,15%		67,17%		100,00%			
		11. Penyusunan Anggaran dan Analisis Program Realisasi Anggaran				0,00	0,00	60.000,00	30,89%	40.000,00	66,67%	0,00	0,00%	0,00%		
			Laporan Program Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen			2 Dokumen	30,89%		30,00%		100,00%			
		Administrasi Umum Pemerintah Daerah														
		12. Penyelenggaraan Anggaran Listrik & Penerangan Rangoan Kantor				0,00	0,00	4.300.000,00	40,20%	3.090.000,00	72,09%	3.102.000,00	100,00%	100,00%		
			Kategori Anggaran Listrik Penerangan Rangoan Kantor	0 jenis	0 jenis			0 jenis	40,20%		80,20%		100,00%			
		13. Penyelenggaraan Proses dan Pelemparan Kantor				0,00	0,00	70.010.000,00	65,67%	45.571.120,00	65,10%	44.111.000,00	104,71%	147,14%		
			Alat Tulis Kantor	2 jenis	0 jenis			38 jenis	55,67%		29,67%		100,00%			
			Batas Kerja	0 buah	0 buah			2 buah	29,67%		99,60%		105,01%			
			Charger Laptop	0 buah	0 buah			3 buah	4,30%		100,00%		107,20%			
			Cat Pak	0 buah	0 buah			5 buah	7,15%		100,00%		107,20%			
			Fluorid	0 buah	0 buah			20 buah	28,67%		79,67%		109,00%			
			Kapasitansi	0 buah	0 buah			3 buah	4,30%		100,00%		107,20%			
			Keyboard	0 buah	0 buah			1 buah	1,43%		100,00%		107,20%			
			Mouse	0 buah	0 buah			12 buah	17,15%		100,00%		107,20%			
			Peralatan Ruang Kerja	0 jenis	0 jenis			20 jenis	28,67%		89,67%		100,00%			
			Roller	0 jenis	0 jenis			8 jenis	11,43%		89,67%		100,00%			
			Toner printer	0 jenis	0 jenis			4 jenis	5,71%		89,67%		100,00%			
			USB Flashdisk	0 buah	0 buah			3 buah	4,30%		100,00%		107,20%			
		14. Penyelenggaraan Barang dan Pengadaan				0,00	0,00	45.200.000,00	42,00%	20.427.500,00	45,20%	22.218.500,00	72,20%	74,77%		
			Barang umum	0 unit	0 unit			12 jenis	42,00%		16,87%		39,41%			
			Pengadaan jasa administrasi	0 kwh	0 kwh			200.000 jam/jr	42,00%		33,00%		86,15%			
		15. Penyelenggaraan Biaya Bahan dan Perkotaan Perumahan-keliling				0,00	0,00	2.440.000,00	22,94%	1.220.000,00	50,00%	1.420.000,00	103,60%	112,71%		
			Jasa Kotoran	0 jenis	0 jenis			2 jenis	40,94%		40,94%		92,84%			
		16. Penyelenggaraan Rupa Kegiatan dan Kegiatan APBD				0,00	0,00	71.240.000,00	66,96%	48.000.000,00	67,39%	49.865.214,00	100,02%	102,47%		
			Waktu Mesin Rapat	0 DS	0 DS			1.440 DS	20,20%		64,01%		80,01%			
			Rupa Kegiatan dan Kegiatan dalam Dampak (DPA)	0 Kpd	0 Kpd			4 Kpd	56,00%		85,00%		116,67%			
			Rupa Kegiatan dan Kegiatan Lain dalam Daerah	0 Kpd	0 Kpd			1 Kpd	14,00%		88,51%		126,20%			
			Rupa Kegiatan dan Kegiatan Luar Jawa	0 Kpd	0 Kpd			1 Kpd	14,00%		84,01%		98,01%			
		Penyediaan Jasa Pengabdian Masyarakat														
		17. Penyelenggaraan Jasa Sosial Masyarakat				0,00	0,00	4.000.000,00	37,93%	2.210.000,00	55,25%	2.430.000,00	60,25%	113,92%		

			Militer		Hilaster	0 tonne	200 tonne	43,33%		50,00%	100,00%							
			Pengantar Pemasangan pada cak		3 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	43,33%		25,00%	68,33%							
			Sistem Kabel		0 Bulan	0 Bulan	30 Bulan	43,33%		44,00%	87,33%							
		18. Penyelidikan dan Kematangan (Rencana Daya Air dan Listrik)			0,00	0,00	5.400.000,00	49,39%	2.700.000,00	41,00%	1.130.172,00	80,39%	49,00%					
			Pembinaan Akademi/Idipon		0 Bulan	0 Bulan	17 Bulan	49,39%		41,00%	90,39%							
		19. Penyelidikan dan Penyelidikan Utama Kairo			0,00	0,00	100.000.000,00	49,39%	27.002.401,00	49,39%	100.000.000,00	100,00%	100,00%					
			Jasa Consulting Service		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	49,39%		49,39%	100,00%							
Pembinaan Barung MKK Daerah Penunjang Cessan Pemerintahan Daerah																		
		20. Penyelidikan dan Pembinaan/Idipon Pemerintahan dan Pijak Keseluruhan Perencanaan (Rencana Kemandirian dan Sistem)			0,00	0,00	84.200.000,00	49,71%	41.870.000,00	49,71%	22.236.700,00	82,09%	61,20%					
			Pembinaan Pijak Keseluruhan perencanaan sistem Keseluruhan sistem jabatan code 2		0 bulan	0 bulan	17 bulan	49,71%		49,00%	98,71%							
			Pembinaan Pijak Keseluruhan perencanaan sistem Keseluruhan sistem jabatan code 4		0 bulan	0 bulan	1 bulan	49,71%		94,00%	144,55%							
			Pembinaan sistem berbasis spreadsheet perencanaan sistem Keseluruhan sistem jabatan code 2		0 bulan	0 bulan	17 bulan	49,71%		49,00%	98,71%							
			Pembinaan sistem berbasis spreadsheet perencanaan sistem Keseluruhan sistem jabatan code 4		0 bulan	0 bulan	1 bulan	49,71%		49,00%	98,71%							
		21. Penyelidikan dan Pembinaan/Idipon Pemerintahan/Idipon Perizinan Keseluruhan Dinas Operasional dan Lapangan			0,00	0,00	209.100.000,00	52,60%	111.211.000,00	48,50%	100.000.000,00	82,60%	107,77%					
			Pembinaan Pijak dan KIR Keseluruhan sistem operasional/lapangan code 4		0 bulan	0 bulan	20 bulan	52,60%		48,00%	100,60%							
			Pembinaan Pijak dan KIR Keseluruhan sistem operasional/lapangan code 5		0 bulan	0 bulan	7 bulan	52,60%		48,00%	100,60%							
			Pembinaan Pijak Keseluruhan sistem operasional/lapangan code 2		0 bulan	0 bulan	27 bulan	52,60%		54,00%	106,60%							
			Pembinaan sistem berbasis spreadsheet sistem operasional/lapangan code 2		0 bulan	0 bulan	27 bulan	52,60%		44,00%	96,60%							
			Pembinaan sistem berbasis spreadsheet sistem operasional/lapangan code 4		0 bulan	0 bulan	20 bulan	52,60%		48,00%	100,60%							
			Pembinaan sistem berbasis spreadsheet sistem operasional/lapangan code 5		0 bulan	0 bulan	7 bulan	52,60%		48,00%	100,60%							
		22. Pembinaan Pemasangan dan Monev Lainnya			0,00	0,00	17.400.000,00	52,14%	9.074.000,00	51,54%	2.500.000,00	22,14%	36,01%					
			AC High		0 bulan	0 bulan	1 bulan	52,14%		27,14%	100,00%							
			HT		0 bulan	0 bulan	1 bulan	52,14%		0,00%	0,00%							

			Komersi	0 unit	0 unit	2 unit	0,00%		-0,00%	0,00%									
			Komputer	0 unit	0 unit	2 unit	0,00%		0,00%	0,00%									
			Laptop	0 unit	0 unit	2 unit	0,00%		0,00%	0,00%									
			Mesin tik	0 unit	0 unit	1 unit	0,00%		0,00%	0,00%									
			Peralatan multimedia	0 unit	0 unit	1 unit	0,00%		0,00%	0,00%									
			Perangkat	0 unit	0 unit	2 unit	0,00%		-0,00%	0,00%									
			Prinir	0 unit	0 unit	10 unit	0,00%		0,00%	0,00%									
		23. Peningkatan Kualitas dan Kualitas Lainnya			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Rendahnya Anggaran Kasus	0 unit	0 unit	2 unit	0,00%		0,00%	0,00%									
Rata-rata capaian kinerja														81,32%	55,43%				
Predikat kinerja														Ulangi	Wentah				

	Kualitas penyelenggaraan ketertarikan minat dan ketertarikan masyarakat meningkat	PROGRAM PENINGKATAN KEENTERAMAN DAN KETERIHAN ULMU	Persentase pengabdian masyarakat ketertarikan minat dan ketertarikan masyarakat	Jumlah peserta pengabdian ketertarikan ULMU dan ketertarikan Masyarakat yang dapat dilaksanakan dibagi peserta pengabdian ketertarikan ULMU dan ketertarikan Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	97,00 %	0,00	100,00 %	0,00	97,00 %	17.044.774.004,00	97% %	7.439.228.677,00	100% %	8.209.677.067,00	100,00%	100,00%					Ka Bidang Ketertarikan ULMU dan Ketertarikan Masyarakat
			Persentase kelompok yang melaksanakan perluasan masyarakat	Perhitungan realisasi komposisi dari 1: (jumlah kelompok yg sudah memiliki website rumah dengan nomor ICT, 1 Lampsu dilanjut (jumlah kelompok di kota Yk) dengan bahan komposisi 30% 2: (jumlah kelompok penerbitan yg terbitnya dibagi (jumlah kelompok di kota Yk) dikali 100% dengan bahan komposisi 30% ditambah (jumlah sekolah penerbitan yg diterbitkan) dibagi (Target penerbitan sekolah penerbitan) dikali 100% dengan	88,24 %	0,00	80,74 %	0,00	88,24 %	0,00	85,00%	0,00	87,00%	0,00	104,82%	0,00%					Kahid Peningkatan Masyarakat

Paket Kebijakan Kerja Yogyakarta (20 orang + 1000)	0 Juli	0 Juli	0 Juli	21,00%	21,00%	200,00%										
	4. Peningkatan Kapasitas SDM Siswa Pada Pemanggotaan Satuan Pendidikan Mencakup seluruh Unit Pendidikan Teras yang Berencana Hal Awal Mula		0 Juli	0 Juli	0 Juli	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%				
Peningkatan peran dan wawasan yang diperoleh kewilayahan	0 Peningkatan Perf.Utan		0 Peningkatan Perf.Utan	0 Peningkatan Perf.Utan	0 Peningkatan Perf.Utan	41,23%	13,00%	30,30%								
Peningkatan wawasan yang diperoleh kewilayahan	0 Peningkatan Perf.Utan		0 Peningkatan Perf.Utan	0 Peningkatan Perf.Utan	0 Peningkatan Perf.Utan	41,23%	13,00%	30,30%								
Tas. Kemampuan (10 orang)	0 Juli		0 Juli	0 Juli	0 Juli	41,23%	3,0%	9,62%								
Tas. Kemampuan (10 orang)	0 Juli		0 Juli	0 Juli	0 Juli	41,23%	3,0%	9,62%								
Workshop Jabatan Pengawal Sampel Pekat Pemeriksaan (10 orang)	0 Juli		0 Juli	0 Juli	0 Juli	41,23%	3,0%	9,62%								
Workshop Jabatan Pengawal Sampel Pekat Pemeriksaan (10 orang)	0 Juli		0 Juli	0 Juli	0 Juli	41,23%	3,0%	9,62%								
	5. Kejayaan atau Lahirnya dan Sementara dalam Tokoh Pencapaian dan Perwujudan Organisasi Kesehatan dan Kesehatan Cegah		0 Juli	0 Juli	0 Juli	45,23%	45,23%	45,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
Peningkatan Gerakan Panti di Sekolah	0 Sekolah		0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	21,00%	21,00%	200,00%								
Peningkatan Panti Di Sekolah	0 Sekolah		0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	21,00%	21,00%	200,00%								
Peningkatan Panti Di Sekolah	0 Sekolah		0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	21,00%	21,00%	200,00%								
Peningkatan Nisbah Kesehatan	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	21,00%	21,00%	200,00%								
Peningkatan Nisbah Kesehatan	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	21,00%	21,00%	200,00%								
Peningkatan Panti Di Sekolah	0 Juli		0 Juli	0 Juli	0 Juli	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%				
Peningkatan Panti Di Sekolah	0 Juli		0 Juli	0 Juli	0 Juli	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%				

Layanan Utama sesuai dengan anggaran																			
		8. Penyelenggaraan Layanan dalam rangka Dampak Positif Program Pekerjaan Umum dan Perumahan			0,00	0,00	100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Keperluan bagi masyarakat yang terdampak positif program Perda Kota Yogyakarta (SPM)	1 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
Keperluan bagi masyarakat yang terdampak positif program Perda Kota Yogyakarta (SPM)	0 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
Penyediaan Perumahan Bersih Kabupaten Kota dan Perumahan Rakyat/Masyarakat																			
		9. Penyelenggaraan Kegiatan, Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Bersih dan Perumahan Rakyat/Masyarakat			0,00	0,00	6.425.873.440,00	42,72%	3.616.371.440,00	42,72%	2.942.934.200,00	100,00%	100,00%						
			Operasi dan Pemeliharaan Perumahan Bersih	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	42,72%	42,72%	100,00%								
			Operasi dan Pemeliharaan Perumahan Bersih	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	42,72%	42,72%	100,00%								
			Operasi dan Pemeliharaan Perumahan Bersih	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	42,72%	42,72%	100,00%								
			Operasi dan Pemeliharaan Perumahan Bersih	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	42,72%	42,72%	100,00%								
			Operasi dan Pemeliharaan Perumahan Bersih	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	42,72%	42,72%	100,00%								
			Operasi dan Pemeliharaan Perumahan Bersih	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	42,72%	42,72%	100,00%								
Penyediaan Kawasan Kuning	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
Penyediaan Kawasan Kuning	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
Penyediaan Kawasan Putih	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
Penyediaan Kawasan Putih	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
Penyediaan Kawasan Putih	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
Penyediaan Kawasan Putih	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
Penyediaan Kawasan Putih	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	42,72%	42,72%	100,00%												
10. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perumahan Bersih dan Perumahan Rakyat/Masyarakat																			
			Layanan penyelenggaraan perumahan yang ditunjuk secara khusus	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	100,00%								
			Layanan penyelenggaraan perumahan yang ditunjuk secara khusus	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	100,00%								
Penyediaan layanan terhadap masyarakat yang tidak memenuhi pengujian PPS	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	44,00%	44,00%	100,00%												
Penyediaan layanan terhadap masyarakat yang tidak memenuhi pengujian PPS	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	44,00%	44,00%	100,00%												
Penyediaan Fasilitas Fasilitas Negeri Negeri (PPNS) Kabupaten Kota																			
		11. Penyelenggaraan Kegiatan dan Kerja PPS			0,00	0,00	6.900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Coaching oleh PPS (20 orang)	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
Coaching oleh PPS (20 orang)	0 Kali		0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
Penyediaan Perumahan Bersih Kabupaten Kota dan Perumahan Rakyat/Masyarakat																			

12. Sertifikasi Pengakuan Perikanan Daerah dan Perikanan Bupati/Wali Kota		0,00	0,00	2.820.000,00	100,00%	2.820.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%								
Tertahapnya Sertifikasi Pengakuan Perikanan Daerah dan Perikanan Bupati/Wali Kota		0 laporan	0 laporan	1 laporan		100,00%	100,00%		100,00%									
Tertahapnya Sertifikasi Pengakuan Perikanan Daerah dan Perikanan Bupati/Wali Kota		1 laporan		1 laporan		100,00%	100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
Total anggaran dari seluruh program																		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Komitmen internal setiap tingkat, monitoring dan evaluasi internal kegiatan serta capaian anggaran setiap bulan pendamping secara program sehingga kinerja ada peningkatan yang signifikan yang berdampak pada peningkatan capaian secara Rincian OPD dapat segera diambil langkah untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	Peningkatan kegiatan pelatihan (diklat) nasional, lokakarya yang diselenggarakan secara rutin dengan pihak ketiga, kegiatan lokakarya, pertukaran informasi kegiatan yang dilaksanakan (pengalaman) Kabupaten, Kabupaten tingkat pemerintahan lainnya yang dilaksanakan dengan anggaran tidak dibatasi (misal) melalui penyempurnaan biaya pegawai pemerintah APBC.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana berikutnya	- memaksimalkan kegiatan secara optimal dengan koordinasi sangat pendamping yang ada, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dengan baik pada masalah berikutnya - Koordinasi lebih intens dengan pihak penyedia dan penyedia lain untuk memancing optimisasi layanan baik kegiatan dan anggaran - Peningkatan ulang tingkat kegiatan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	Peningkatan pelaksanaan pada tahun berikutnya dengan melihat hasil capaian sebelumnya pada tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan pada tahun awal dapat mengambil pelajaran yang berharga signifikan, sehingga terdapat dengan peningkatan kinerja lebih awal dengan penyediaan jasa pihak ketiga																	

Tegalrejo,

Direktor oleh
Kepala SATKOR PP

2022

Tegalrejo,

Direktori oleh
Kepala BARUDA

2022

Dr. AGUS WINARDO,
NIP. 19730324093011000

Agus Tri Ratumanan, B.S., M.P.
NIP. 19730324093011000

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepemndagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Dari dinamisasi kebijakan pelaksanaan kegiatan dan juga berdasarkan hasil rewiu, monitoring dan evaluasi, terdapat penambahan sub kegiatan baru pada perencanaan kerja perubahan tahun 2022 yakni Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut pelaksanaan Surat Edaran Kemendagri tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes Kepmendagri. Adapun Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Satpol PP pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :

- a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Reallsasi Anggaran
- c. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia
 - 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 7) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 8) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- Pengurangan dan penambahan anggaran pada sub kegiatan perubahan renja 2022 beserta keterangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 (REKJA PERUBAHAN 2022)
Kota Yogyakarta - SIPD PENETAPAN

1.05 : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
NAMA OPD : SATUAN POLISI RAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Setelah desk)	Belanja Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Kecamatan Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5-7)	10
1.05.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.128.041.788	28.788.392.731	670.350.948	
1.05.05.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.948.132	22.804.352	(4.558.000)	
1.05.05.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2022; Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	Dokumen Renja Tahun 2022; Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 dokumen	3 dokumen	1.000.000	900.000	(1.160.000)	Efektifitas koordinasi; efisiensi anggaran; tidak minum rapat
		Forum OPD untuk Kapasitas Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Forum OPD untuk Kapasitas Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				
1.05.05.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen ERA SIPD	ERA dan ERA OPD, DPA dan DPPA OPD	ERA dan ERA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	4 dokumen	1.000.000	620.000	(377.000)	Efektifitas koordinasi; efisiensi anggaran; tidak minum rapat
1.05.05.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	3 dokumen	12.478.333	28.257.333	(1.630.000)	Efektifitas koordinasi; efisiensi anggaran; tidak minum rapat
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	5 dokumen	5 dokumen				
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 dokumen	2 dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SIPD	5 jenis dokumen	5 jenis dokumen				
1.05.05.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	1.000.000	820.000	(277.000)	Efektifitas koordinasi; efisiensi anggaran; tidak minum rapat
1.05.05.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					28.529.940.000	28.890.371.296	38.691.296	
1.05.05.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	174 ASN	174 ASN	18.928.178.000	18.940.204.296	12.048.296	Pemaksimalan perhitungan gaji dan TPP dan Bidang Rencanadanaan SPKAD (pembahasan volume 2 bulan gaji); Pengurangan anggaran TPP
1.05.05.2.02.02	Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	2 dokumen	90.000	90.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.05.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen	3 dokumen	90.000	90.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.05.2.02.04	Administrasi dan Pelaksanaan Akuntansi SIPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	3 dokumen	3 dokumen	90.000	90.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.05.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SIPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	80.000	80.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.05.2.02.06	Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Tanggapan Pemeliharaan	Bahan Tanggapan Pemeliharaan	Bahan Tanggapan Pemeliharaan	12 dokumen	12 dokumen	417.000	500.000	(117.000)	Efektifitas koordinasi; efisiensi anggaran; tidak minum rapat
1.05.05.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semestaran SIPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semestaran	Laporan Keuangan Bulanan/Semestaran	11 dokumen	11 dokumen	417.000	417.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.05.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	80.000	80.000	0	Tidak terdapat perubahan

Kode	Musi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (seluruh desk)	Salah bertambah/ berkurang	Keterangan
		Keadaan Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					238.488.888	757.684.388	519.225.600	
1.05.01.2.06.01	Pemeliharaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	8 jenis	4.105.000	11.055.000	17.250.000	Peningkatan daya listrik (10500 watt x Rp. 1.700,00)
1.05.01.2.06.01	Pemeliharaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Alat Tulis Kantor Peralatan Rumah Tangga Batu tulis Mouse Flashdisk Kabel USB USB Terminal Toner printer Keyboard Baterai laptop Charger laptop Cool Pad Kipas angin (exhaust fan) Kipas angin uap outdoor AC Komputer/PC Laptop Printer Warna Meja 1x2 bbrp Kursi Kaki Putar Sepatu Dinas Lapangan Sepatu Dinas Harian Sofa Thermocat Perangkatkan CCTV	Alat Tulis Kantor Peralatan Rumah Tangga Batu tulis Mouse Flashdisk Kabel USB USB Terminal Toner printer Keyboard Baterai laptop Charger laptop Cool Pad Kipas angin (exhaust fan) Kipas angin uap outdoor AC Komputer/PC Laptop Printer Warna Meja 1x2 bbrp Kursi Kaki Putar Sepatu Dinas Lapangan Sepatu Dinas Harian Sofa Thermocat Perangkatkan CCTV	30 jenis 20 jenis 3 jenis 11 buah 20 buah 5 buah 3 buah 4 jenis 4 buah 3 buah 3 buah 5 buah 2 buah 6 buah 8 unit 1 unit 3 unit 1 unit 11 buah 11 buah 126 pasang 1 set 1 buah 1 set	30 jenis 20 jenis 3 jenis 11 buah 20 buah 5 buah 3 buah 4 jenis 4 buah 3 buah 3 buah 5 buah 2 buah 6 buah 8 unit 1 unit 3 unit 1 unit 11 buah 11 buah 126 pasang 1 set 1 buah 1 set	73.018.888	491.594.303	418.585.600	Peningkatan anggaran belanja barang pendukung katagori Satpol PP sejumlah 15 jenis
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	Barang cetakan	11 jenis	11 jenis	85.258.000	85.258.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peningkat-Undoan	Penggandaan koran/buletin/jurnal Surat Kabar selama 12 bulan	Penggandaan surat-surat/jurnal/buletin Surat kabar selama 12 bulan	30000 lembar 1 jenis	30000 lembar 1 jenis	1.940.000	1.880.000	240.000	Peningkatan manajemen harga mtl
1.05.01.2.06.20	Pemeliharaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Siko-	Makan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (Dik) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	Makan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (Dik) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1440 OR 4 kali 5 kali 5 kali	1440 OR 4 kali 11 kali 5 kali	13.160.000	134.580.000	121.600.000	Peningkatan volume pengalangan dinas ke luar daerah (Konsultasi ke luar daerah dalam Jawa = 5 org x 1 hari x 5 kali x 1.700.000)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Sesudah Debit)	Salah Sembang/ Berimbang	Keterangan
		Keuangan Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					218.968.000	218.968.000	0	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Manguat	Surat Kantor	Surat Kantor	50 surat	50 surat	6.000.000	6.000.000	0	Tidak terdapat perubahan
		Pengganti bawak material pada cek Material	Pengganti bawak material pada cek Material	10 buku	10 buku				
				300 lembar	300 lembar				
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	3.400.000	3.400.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Cleaning Service	Jasa Cleaning Service	12 bulan	12 bulan	100.968.000	100.968.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					714.430.000	848.860.000	138.430.000	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	17 unit	17 unit	64.500.000	64.500.000	0	Tidak terdapat perubahan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit	1 unit				
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	17 unit	17 unit				
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit	1 unit				
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertolakan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	17 unit	17 unit	399.280.000	399.320.000	3.040.000	- Penambahan anggaran pemeliharaan kendaraan roda dua operasional (2 unit)
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	28 unit	28 unit				- Penambahan biaya perorangan roda (17 unit)
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	1 unit	1 unit				- Penyediaan harga satuan barang, Pengurangan anggaran BBM kendaraan operasional BKD kabupaten
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	17 unit	17 unit				
		Pembayaran Pajak dan ITR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	Pembayaran Pajak dan ITR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	28 unit	28 unit				
		Pembayaran Pajak dan ITR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	Pembayaran Pajak dan ITR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	1 unit	1 unit				
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	komputer	komputer	1 unit	1 unit	17.400.000	17.400.000	0	Tidak terdapat perubahan
		laptop	laptop	1 unit	1 unit				
		Printer	Printer	10 unit	10 unit				
		Kamera	Kamera	1 unit	1 unit				
		AC Split	AC Split	1 unit	1 unit				
		Meja kerja	Meja kerja	1 unit	1 unit				
		HT	HT	1 unit	1 unit				
		Peralatan multimedia	Peralatan multimedia	1 unit	1 unit				
		Pompa air	Pompa air	1 unit	1 unit				
1.05.01.1.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Reparasi bangunan kantor	Reparasi bangunan kantor	1 unit	4 ruang	10.000.000	138.740.000	148.740.000	Rahab Perbaikan Ruang Kantor, Kamar Mandi dan Interior Ruang rapat, Perbaikan ruang saat (Akar Karoti, dan Ruang dtsa Pdl PP

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Sesudah Debit)	Salah Sembang/ Berulang	Keterangan
		Keadaan Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					17.044.773.004	18.087.750.393	1.042.976.389	
1.05.02.1.01	Pengawasan/ Ganguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					9.291.813.452	9.526.432.853	234.619.399	
1.05.02.1.01.01	Pengawasan/ Ganguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penertiban, Pelaksanaan Patrol, Pengamatan, dan Pengendalian	kegiatan Patrol yang dilakukan pengamatan Tempat penting milik Pemerintah yang dilakukan pengamatan (Komplek Balai kota, Rumah Dinas, Shelter Covid19, Rumah Dinas Jln. Jada Tut Harsono, Gedung Dda, Panti Vertikal, CCTV).	kegiatan Patrol yang dilakukan pengamatan Tempat penting milik Pemerintah yang dilakukan pengamatan (Komplek Balai kota, Rumah Dinas, Shelter Covid19, Rumah Dinas Jln. Jada Tut Harsono, Gedung Dda, Panti Vertikal, CCTV).	120 pengamatan	145 pengamatan	5.117.903.698	5.741.450.698	624.546.000	- Penambahan volume kegiatan pengamatan umum (honor Non PNS, makan minum, bensin), sewa sarung) dan kegiatan operasional Satgas Anti Kriminal (honor Non PNS dan makan minum ops), sejumlah Rp136.873.000.00 - Penambahan volume kegiatan pengamatan shelter covid sejumlah Rp146.473.000.00 - Penambahan petugas pengamatan oleh dinas ketiga yaitu Pengamatan Rumah Dinas Walikota, Gedung Sda Paj 77, Panti Vertikal, dan Pengamatan Tertutup CCTV sejumlah Rp341.200.000.00
1.05.02.1.01.02	Pemindaian atas Ganguan Ketenteraman dan ketertiban umum. Berostakan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Monitoring dan penyediaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Monitoring Sma Pelajar	Monitoring dan penyediaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Monitoring Sma Pelajar	36 laporan operasi	36 laporan operasi	158.336.271	158.336.271	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan ketertentraman dan ketertiban umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota	Pembinaan SDM Kajian penegakan Peraturan Daerah Edukasi teknis petugas bidang internal	Pembinaan SDM Kajian penegakan Peraturan Daerah Edukasi teknis petugas bidang internal	10 dokuman	10 dokuman	31.813.000	45.305.000	13.492.000	Penambahan volume kegiatan kajian penegakan peraturan daerah (makan minum dan transportasi) 100 kajian pemasyarakatan hukum dan jumlah makan minum bidang pembinaan SDM
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Pemudung Masyarakat dalam Rangka Ketertentraman dan ketertiban umum	Pikat Satlimas kota Yogyakarta (20 orang 3 shift) Mobilisasi petugas Inmas Mobilisasi Petugas Inmas dalam penanganan musibah dan bencana (20 orang) Pembuatan Kartu Tanda Anggota Inmas	Pikat Satlimas kota Yogyakarta (20 orang 5 shift) Mobilisasi petugas Inmas Mobilisasi Petugas Inmas dalam penanganan musibah dan bencana (20 orang) Pembuatan kartu Tanda Anggota Inmas	304 hari	365 hari	1.830.263.398	1.971.983.398	141.720.000	- Penambahan volume waktu yang diikat petugas Inmas dari 30 bulan menjadi 11 bulan sejumlah Rp209.800.000.00 - Penambahan volume kegiatan mobilisasi Inmas (honor dan makan minum operasional) sejumlah Rp30.000.000 - Penambahan volume pembuatan KTA Inmas (618 buah) sejumlah Rp1.700.000.000 - Pengerahan anggaran DSH CBT hasil pemetaan dan pemutakhiran ES Mandagri (gede ke 200 kg Pengerahan atas Pengerahan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota sejumlah Rp18.000.000.00)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Sesudah Debit)	Salah Berambah/ Berurang	Keterangan	
		Keukuran Sub Kegiatan		Target						
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pemudung Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berwujud Pak-Aksi Masyarakat	Kemampuan Pol PP dan Ummas (80 orang pol pp dan 80 orang Ummas) Tas kemampuan (80 orang) Pembekalan Ummas Peraturan perundang-undangan yang diadopsikan/dicodifikasi Hingga Korak Wartabat Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja (100 orang)	Kemampuan Pol PP dan Ummas (80 orang pol pp dan 80 orang Ummas) Tas kemampuan (80 orang) Pembekalan Ummas Peraturan perundang-undangan yang diadopsikan/dicodifikasi Hingga Korak Wartabat Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja (100 orang)	11 kali 1 kali 1 kali 8 peraturan perundang-undangan 13 kali 1 kali	11 kali 1 kali 3 kali 7 peraturan perundang-undangan 9 kali 1 kali	248.441.181	211.321.181	(37.120.000)	Pengurangan volume kegiatan hingga korak karena tidak dapat melaksanakan kegiatan seremonial/lapara di tingkat Kecamatan (honor petugas dan makan minum) sejumlah Rp34.800.000,00 - Pengeseran anggaran DBH CHT hasil pemetaan dan pemutakhiran SE Mandagri (gaji korak ssp baru) sebanyak Pengeseran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sejumlah Rp2.800.000,00	
1.05.02.1.01.07	Kerjasama antar lembaga dan komunitas dalam Teknik Pengabdian dan Peningkatan Bangunan Komunitas dan Kemandirian Umum	Pencanangan Gerakan Kampung Tanpa Tawar Pencanangan Gerakan Pantis for School Evaluasi Implementasi Gerakan Tanpa Tawar Penumbuhan Pantis for School Penyusunan Naskah Kebijakan	Pencanangan Gerakan Kampung Tanpa Tawar Pencanangan Gerakan Pantis for School Evaluasi Implementasi Gerakan Tanpa Tawar Penumbuhan Pantis for School Penyusunan Naskah Kebijakan	31 kampung 4 sekolah 12 laporan 8 sekolah 3 dokumen	31 kampung 4 sekolah 12 laporan 8 sekolah 3 dokumen	1.213.989.999	1.211.404.299	(2.585.700)	Pengurangan volume 1 bulan anggaran honorarium beserta SPIS Tenaga Teknis Duta Kemandirian	
1.05.02.1.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kemandirian dan Kemandirian Umum	Pengadaan Fasilitas Dinas Lapangan Ummas beserta kelengkapannya Pengadaan Sarana Dinas Lapangan Ummas Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ketugasan lapangan petugas Ummas	Pengadaan Fasilitas Dinas Lapangan Ummas beserta kelengkapannya Pengadaan Sarana Dinas Lapangan Ummas Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ketugasan lapangan petugas Ummas	30 stel 100 pasang 3 jenis	315 stel 100 pasang 3 jenis	40.900.000	338.741.133	298.140.133	- Peningkatan volume pengadaan PDL Ummas beserta kelengkapannya (435 stel) sejumlah Rp181.250.000,00 - Peningkatan pengadaan sarana lapangan Ummas (100 pasang) sejumlah Rp40.900.000,00 - Peningkatan pengadaan sarana pendukung ketugasan peninggiran muatan dan sarana (seperti busi tanah dll) tipe pengabdian berupa teflonak, dragbar, shalshaw, sika) sejumlah Rp48.000.000,00	
1.05.02.1.01.10	Penyediaan Layanan Bagi Masyarakat Termasuk Pengadaan Peraturan Daerah dan Perkada	Kompetensi bagi Masyarakat yang terakumulasi dampak pengabdian warga Kota Ya (SPM)	Kompetensi bagi Masyarakat yang terakumulasi dampak pengabdian warga Kota Ya (SPM)	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	130.000.000	80.000.000	(50.000.000)	Pengurangan anggaran ganti kerugian kepada WNI yang terakumulasi akibat pengabdian warga dan keluarga (o.d. T.W) tidak terdapat realisasi anggaran kegiatan	
1.05.02.1.01	Pengadaan Ferta Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					8.764.174.312	8.764.937.912	16.763.600		
1.05.02.1.01.01	Sosialisasi Pengeseran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Terselenggaranya sosialisasi pengeseran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		1 laporan	0	1.820.000	1.820.000		Sub Kegiatan baru. Peningkatan anggaran DBH CHT hasil pemetaan dan pemutakhiran SE Mandagri (pengabdian dan gaji ssp baru) kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pemudung Masyarakat

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Murni	Pagu Perubahan (Sesudah Debit)	Salah Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Keuangan Sub Kegiatan		Target					
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan				
3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10		
1.05.01.1.01.01	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Operasi Non Yurdi Pelaksanaan Perda Pengawasan pelaksanaan perda dan peraturan Operasional Poldi Pemang Raja Peristiwa	Operasi Non Yurdi Pelaksanaan Perda Pengawasan pelaksanaan perda dan peraturan Operasional Poldi Pemang Raja Peristiwa	11 laporan 11 laporan 11 laporan	11 laporan 11 laporan 11 laporan	3.465.173.454	3.437.166.854	(28.006.600)	- Terdapat ada anggaran untuk pengawasan jasa tenaga pengabdian Kawasan Tirta No (Kilometer, AA), Kawasan Tirta, dan Kawasan Wisata sejumlah Rp188.800.000,00 - Peningkatan volume entitas kegiatan dan personil (honor petugas operasional) dengan penugasan pada desa-desa melalui rumah pendukung operasional - Peningkatan anggaran pengadaan secara langsung kegiatan pengabdian perda - Peningkatan anggaran DBH DHT hasil pemetaan dan pemutakhiran SE Madagaf (joker ke sub reg Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota sejumlah Rp9.400.000,00)
1.05.01.1.01.03	Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan pelanggaran perda yang diload secara yurdi Penegakan hukum terhadap tantangan yang tidak mematuhi panggilan PPHB	Laporan pelanggaran perda yang diload secara yurdi Penegakan hukum terhadap tantangan yang tidak mematuhi panggilan PPHB	11 laporan 11 pelanggaran	11 laporan 11 pelanggaran	100.900.042	104.550.042	46.650.000	- Peningkatan volume 3 bulan pada Honor Tim Kelembagaan Optimalisasi Pengabdian Perda (Porkominda) - Peningkatan anggaran DBH DHT hasil pemetaan dan pemutakhiran SE Madagaf (joker ke sub reg Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dan sub reg Pemberdayaan Peningkatan Masyarakat dalam Rangka Keterampilan dan Keberdayaan Umum sejumlah Rp24.400.000.00)
			Tertindakannya Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kabupaten Sesuai SOP (DBH DHT)		10 laporan				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Murni	Pagu Perubahan (Sesudah Deck)	Salah bertambah/ berkurang	Keterangan
		Keuaran Sub Kegiatan		Target					
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-7)	10
1.05.02.1.02	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					6.980.000	6.980.000	0	
1.05.02.1.02.01	Pengembangan kapasitas dan keterampilan PPNS	Coaching clinic PPNS (30 orang)	Coaching clinic PPNS (30 orang)	1 kali	1 kali	6.980.000	6.980.000	0	Tidak terdapat perubahan
TOTAL						35.170.815.589	36.897.743.094	1.726.927.505	

Sampai dengan TW II 2022 rencana kerja dan anggaran perubahan tahun ini. Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan. Hanya saja berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan revaluasi capaian kinerja sampai dengan 2021, terdapat revisi target capaian tujuan, target sasaran dan target program kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan target tujuan 97,65%.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2022 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat, dengan target sasaran 97,65%.

Anggaran Belanja Daerah Murni Tahun 2022 sejumlah Rp35.170.815.589,00. Total kebutuhan pagu indikatif Belanja Daerah untuk seluruh Program Dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp36.897.743.094,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga terdapat kenaikan pagu sejumlah Rp.1.726.927.505,00 terhadap anggaran murni 2022, dengan rincian kegiatan dapat dilihat dalam tabel Rencana Kerja Perubahan Satpol PP sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.1.

**Penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.01.0020 Satuan Pelaksanaan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.01.0020 Satuan Pelaksanaan

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Output Perfor e	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Sebelum	Sesudah	Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dasar/ Peta Indikator (Rp.)		
						Program		Kategori Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah		Tingkat Ulu	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH																			
1.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPES PER) JUDULAN MASYARAKAT																			
1.05	PROGRAM PEMULIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KEDESA																			
1.05.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
1.05.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Monev SAP dan Informatika	Dukung Renc. Tahun 2022, Renc. Pelaksanaan Tahun 2022, dan Renc. Kerja. Formasi DTD, RTM, Kesiapan Pengadaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dukung pelaksanaan administrasi dan teknis Perencanaan Daerah	Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	4 (144) - 00 s.d 00	4 (144) - 00 s.d 00	3 dokumen - 1 bentuk Buku	3 dokumen - 1 bentuk Buku	100 %	100 %	2.000.000	000.000	PERANGKAPAN ASSET DAERAH (PAD)	Hasil Perencanaan SAP dan Informatika	4 (144) - 00 s.d 00	4.000.000			
1.05.01.01.23	Evaluasi dan Penyusunan Dokumen RAB, GOR	Hasil Monev SAP dan Informatika	RAB, dan RAB DTD, DPA dan DPA DPO	Dukung pelaksanaan administrasi dan teknis Perencanaan Daerah	Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	4 (144) - 00 s.d 00	4 (144) - 00 s.d 00	4 dokumen - 4 dokumen	4 dokumen - 4 dokumen	100 %	100 %	1.000.000	423.000	PERANGKAPAN ASSET DAERAH (PAD)	Hasil Perencanaan SAP dan Informatika	4 (144) - 00 s.d 00	1.000.000			
1.05.01.01.23.01	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja dan RTR dan Rencana Kerja DPO	Hasil Monev SAP dan Informatika	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan dan Hasil Renc. DPO Tahunan (R. 2021, R. 2022, dan R. 2023) Dokumen Rincian Pelaksanaan Pelaksanaan, Hasil Rincian DPO Laporan Tahunan RTR dan RTR dan Rencana Kerja DPO Penyusunan Rencana dan Pertanggung Jawaban Rencana	Dukung pelaksanaan administrasi dan teknis Perencanaan Daerah	Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	4 (144) - 00 s.d 00	4 (144) - 00 s.d 00	3 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen - 3 dokumen 2 dokumen - 2 dokumen	3 dokumen - 3 dokumen 3 dokumen - 3 dokumen 2 dokumen - 2 dokumen	100 %	100 %	32.475.000	20.800.000	PERANGKAPAN ASSET DAERAH (PAD)	Hasil Perencanaan SAP dan Informatika	4 (144) - 00 s.d 00	32.475.000			
1.05.01.01.23.02	Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Monev SAP dan Informatika	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukung pelaksanaan administrasi dan teknis Perencanaan Daerah	Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	4 (144) - 00 s.d 00	4 (144) - 00 s.d 00	4 dokumen - 4 dokumen	4 dokumen - 4 dokumen	100 %	100 %	1.000.000	675.000	PERANGKAPAN ASSET DAERAH (PAD)	Hasil Perencanaan SAP dan Informatika	4 (144) - 00 s.d 00	1.000.000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0070 Satuan Pnlai Pemang Projk
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Pnlai Pemang Projk

Kode	Uraian/ Kisiang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Pemin- g	Program Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Ragu Indikator (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikator (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.05.01.22.2	Aktivitas Kegiatan Perangkat Daerah																21.824.925,8 01	
1.05.01.22.2.01	Penyediaan Cadangan Tanggapan ASN	Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	Capaian Tanggapan ASN	Dukung terlaksananya anggaran ini sebagai Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kecamatan Satrio, Kelurahan Satrio	4.744.400.000	4.744.400.000	134.434	134.434	100%	100%	0.000.000.000	0.000.000.000	PROSEDUR ASU (ARTIKEL 140)	Dana Spesial Finansial Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	4.744.400.000	21.824.925,8
1.05.01.22.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukung terlaksananya anggaran ini sebagai Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kecamatan Satrio, Kelurahan Satrio	4.744.400.000	4.744.400.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	0.000.000.000	0.000.000.000	PROSEDUR ASU (ARTIKEL 140)		Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	4.744.400.000	190.000
1.05.01.22.2.03	Pelaksanaan Penunjang dan Penyelenggaraan Kegiatan ASN	Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	Saluran Pelaksanaan Kegiatan	Dukung terlaksananya anggaran ini sebagai Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kecamatan Satrio, Kelurahan Satrio	4.744.400.000	4.744.400.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%	0.000.000.000	0.000.000.000	PROSEDUR ASU (ARTIKEL 140)		Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	4.744.400.000	190.000
1.05.01.22.2.04	Kelembagaan dan Pelaksanaan Administrasi SAKIP	Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	Administrasi dan Pelaporan Kelembagaan	Dukung terlaksananya anggaran ini sebagai Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kecamatan Satrio, Kelurahan Satrio	4.744.400.000	4.744.400.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%	0.000.000.000	0.000.000.000	PROSEDUR ASU (ARTIKEL 140)		Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	4.744.400.000	190.000
1.05.01.22.2.05	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Tanggapan ASN	Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	Tanggapan Kegiatan ASN Tahun	Dukung terlaksananya anggaran ini sebagai Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kecamatan Satrio, Kelurahan Satrio	4.744.400.000	4.744.400.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%	0.000.000.000	0.000.000.000	PROSEDUR ASU (ARTIKEL 140)		Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	4.744.400.000	90.000
1.05.01.22.2.06	Penjajahan dan Penyelenggaraan Tanggapan Pemeliharaan	Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	Saluran Tanggapan Pemeliharaan	Dukung terlaksananya anggaran ini sebagai Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kecamatan Satrio, Kelurahan Satrio	4.744.400.000	4.744.400.000	2.000.000	2.000.000	100%	100%	400.000.000	400.000.000	PROSEDUR ASU (ARTIKEL 140)		Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	4.744.400.000	214.000
1.05.01.22.2.07	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Tanggapan dan Penyelenggaraan Kegiatan ASN	Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	Tanggapan Kegiatan dan Penyelenggaraan	Dukung terlaksananya anggaran ini sebagai Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kecamatan Satrio, Kelurahan Satrio	4.744.400.000	4.744.400.000	12.000.000	12.000.000	100%	100%	400.000.000	400.000.000	PROSEDUR ASU (ARTIKEL 140)		Hasil Penelitian SAKIP dan Nopokorasi	4.744.400.000	214.000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.000.000.01.0000 Satuan Paket Pemang Proj
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Paket Pemang Proj

Kode	Uraian/ Kisiang/ Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana	Catatan Pembi	Program Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Ragu Indikator (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pisu Indikat (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolak Ura	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.05.01.2.0.01	Bersedia Bawang Cabai dan Paspal	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	Bawang cabai Paspal	Dukung ketersediaan bahan baku sdn Inapektat	Kota Yogyakarta	4.744.480.000	4.744.480.000	12.000	12.000	100%	100%	85.753.000	85.753.000	PENDAHAN ASU DAIHAN (PAD)	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	4.744.480.000	140.000.000	
1.05.01.2.0.02	Bersedia Bahan Baku dan Paspal	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	Gula Kabin sdn Inapektat	Dukung ketersediaan bahan baku sdn Inapektat	Kota Yogyakarta	4.744.480.000	4.744.480.000	2.000	2.000	100%	100%	2.840.000	2.840.000	PENDAHAN ASU DAIHAN (PAD)	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	4.744.480.000	2.840.000	
1.05.01.2.0.03	Bersedia Bahan Baku dan Paspal	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	Bahan Baku Paspal sdn Inapektat	Dukung ketersediaan bahan baku sdn Inapektat	Kota Yogyakarta	4.744.480.000	4.744.480.000	4.000	4.000	100%	100%	75.000.000	75.000.000	PENDAHAN ASU DAIHAN (PAD)	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	4.744.480.000	75.000.000	
1.05.01.2.0.04	Penyediaan Jasa Pengumpul Urusan Pemerintahan Daerah											210.368.000	210.368.000				240.000.000	
1.05.01.2.0.05	Penyediaan Jasa Pengumpul Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	Biaya Pengumpul Urusan Pemerintahan Daerah	Dukung ketersediaan bahan baku sdn Inapektat	Kota Yogyakarta	4.744.480.000	4.744.480.000	10.000	10.000	100%	100%	5.000.000	5.000.000	PENDAHAN ASU DAIHAN (PAD)	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	4.744.480.000	5.000.000	
1.05.01.2.0.06	Penyediaan Jasa Pengumpul Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	Biaya Pengumpul Urusan Pemerintahan Daerah	Dukung ketersediaan bahan baku sdn Inapektat	Kota Yogyakarta	4.744.480.000	4.744.480.000	10.000	10.000	100%	100%	5.000.000	5.000.000	PENDAHAN ASU DAIHAN (PAD)	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	4.744.480.000	5.000.000	
1.05.01.2.0.07	Penyediaan Jasa Pengumpul Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	Biaya Pengumpul Urusan Pemerintahan Daerah	Dukung ketersediaan bahan baku sdn Inapektat	Kota Yogyakarta	4.744.480.000	4.744.480.000	10.000	10.000	100%	100%	190.368.000	190.368.000	PENDAHAN ASU DAIHAN (PAD)	Hasil Pembi SAOP sdn Inapektat	4.744.480.000	190.368.000	
1.05.01.2.0.08	Penyediaan Bawang Putih dan Paspal Perangkat Daerah											711.138.000	849.380.000				1.000.000.000	

**Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.01.0020 Satuan Polisi Pemangku
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pemangku

Kode	Urusan/Kelompok Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2022								Kategori Pembiayaan	Profilan Mula Rencana Tahun 2022					
				Capaian Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan		Ragu Indikator (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
							Program		Kategori Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Ragu Indikator (Rp.)		Terkait	Target	
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum			Setelah	Sebelum			Setelah
1.01.01.23.01	Penyusunan dan Pelaksanaan Bioteknologi dan Paksi Sertifikasi Perangkat Desa atau Kelurahan Tingkat Kelurahan	Hasil Nonfarm (SAKP dan Impakform)	Perencanaan Paksi sertifikasi perangkat desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan (tahap 1)	Dukungan/koordinasi/dukungan teknis	Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	4.040 - 01.0.0.00	4.040 - 01.0.0.00	17 unit	17 unit	100 %	100 %	84.500.000	84.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Perangkat SAKP dan Impakform	4.040 - 01.0.0.00	75.400.000	
1.01.01.23.01	Pemertahanan dan Pemeliharaan Paksi dan Perangkat Desa atau Kelurahan Tingkat Kelurahan	Hasil Nonfarm (SAKP dan Impakform)	Pemertahanan Paksi sertifikasi perangkat desa/kelurahan tingkat desa/kelurahan (tahap 2)	Dukungan/koordinasi/dukungan teknis	Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	4.040 - 01.0.0.00	4.040 - 01.0.0.00	20 unit	20 unit	100 %	100 %	298.700.000	298.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Perangkat SAKP dan Impakform	4.040 - 01.0.0.00	263.800.000	

BAB IV PENUTUP

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selain itu juga sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/ Kegiatan, Capaian Program/ Kegiatan/ Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada jalur perencanaan yang sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta.

Demikian Renja Perubahan Satpol PP ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Yogyakarta,

2022

Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA
Drs. AGUS WINARTO

